

LAPORAN TRIWULAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I A

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara

Pelayanan Publik



PERIODE APRIL - JUNI 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I A

Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik

Disahkan di Gresik
Pada Hari Selasa, 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A,



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
19680707 199603 1 002

**LEMBAR TIM PENYUSUN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

**LAPORAN TRIWULAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS I A**

DISUSUN OLEH :

PEMBINA

MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.

ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

PENANGGUNGJAWAB

MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

KOORDINATOR TIM SURVEI

DEDIK WANDONO, S.H.

ANGGOTA :

- 1. BIMA WAHYU ASYA, S.H.**
- 2. AHWA, S.Pd.**
- 3. RIRIS DWI SULISTYANINGSIH, S.M.**
- 4. SYAMSUL ARIFIN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya tim Survei kepuasan masyarakat Pengadilan Negeri Gresik telah menyelesaikan hasil Survei SKM triwulan periode April - Juni 2025 setelah tercapainya Akreditasi PMPN, Survei unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A mengadakan Survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan akreditasi yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan / diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan / diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang diambil dengan menggunakan aplikasi siSUPER.

Pelaksanaan Survei dan laporan Survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Gresik, 1 Juli 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
DARTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Tujuan dan Sasaran	9
1.3 Rencana Kerja Pelaksanaan	10
1.4 Tahapan Pelaksanaan	10
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	
2.1 Metode Survei	11
2.2 Teknik Pengumpulan Data	11
2.3 Variabel Pengukuran SKM	11
2.4 Teknik Analisis Data	12
BAB III. PROFIL RESPONDEN	
3.1 Umur	14
3.2 Jenis Kelamin	14
3.3 Pendidikan Terakhir	15
3.4 Pekerjaan Utama	15
BAB IV. HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN)	16
4.1 Persyaratan	17
4.2 Prosedur	18
4.3 Waktu Pelayanan	19
4.4 Biaya / Tarif	20
4.5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	21
4.6 Kompetensi Pelaksana	22
4.7 Perilaku Pelaksana	23
4.8 Maklumat Pelayanan	24
4.9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Hasil Survei kualitatif	25
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Rekomendasi	28
RUJUKAN	29

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Keterangan Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1	Kategori Mutu Pelayanan	13
2	Responden Menurut Karakteristik Umur	14
3	Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin	14
4	Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	15
5	Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	15
6	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Persyaratan	17
7	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Prosedur	18
8	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan	19
9	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Biaya / Tarif	20
10	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Layanan	21
11	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana	22
12	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana	23
13	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan	24
14	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	25

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Keterangan Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Persyaratan	17
2	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Prosedur	18
3	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan	19
4	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Biaya / Tarif	20
5	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Layanan	21
6	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana	22
7	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana	23
8	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan	24
9	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik umum ataupun kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan yang berkualitas.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat para pencari keadilan yang memiliki karakteristik kebutuhan publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.

Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari pelayanan yang baik. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik Survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A melaksanakan Survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

1.3. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran / Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A ini dilaksanakan pada bulan April s/d Juni 2025.

1.4. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, antara lain :

1. Tim Survei menentukan metode Survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim Survei membuat instrumen berupa angket / kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Tim Survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan Survei.
4. Tim Survei melakukan Survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas Survei dan diserahkan kepada tim Survei.
6. Tim Survei mengkode kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data dalam excel file.
7. Tim Survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, antara lain : pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa Aplikasi Survei Kepuasan Pelanggan dengan jawaban tertutup dan terbuka yang telah tersedia.

2.3. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

2.4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A ditentukan sebagai berikut :

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1 - 4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 - 100,00	3,26 - 4,00
2.	B (Baik)	62,51 - 81,25	2,51 - 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 - 62,50	1,76 - 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 - 43,75	1,00 - 1,75

BAB III PROFIL RESPONDEN

3.1. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

NO.	UMUR	FREKUENSI	(%)
1.	18 - 28	8	6,50
2.	29 - 39	55	44,72
3.	40 - 49	34	27,64
4.	50 - 59	26	21,14
5.	60 <	0	0,00
	Tidak mencantumkan Usia	0	0,00
JUMLAH		123	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur **29 tahun s/d 39 tahun (44,72%)**.

3.2. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	(%)
1.	LAKI - LAKI	83	63,47
2.	PEREMPUAN	40	32,52
3.	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0,00
JUMLAH		123	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin **LAKI-LAKI** sebanyak **83 orang (63,47%)**.

3.3. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1.	TIDAK SEKOLAH	0	0,00
2.	SD	6	4,87
3.	SMP	9	7,31
4.	SMA / SMK	34	27,64
5.	DIPLOMA	0	0,00
6.	SARJANA - S1	52	42,27
7.	PASCA SARJANA - S2	22	17,88
8.	S3	0	0,00
JUMLAH		123	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir kategori **SARJANA – S1** sebanyak **52 orang (42,27%)**.

3.4. Pekerjaan Utama

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

NO.	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1.	PNS	1	0,81
2.	TNI / POLRI	0	0,00
3.	PEGAWAI SWASTA	5	4,06
4.	WIRASWASTA / USAHAWAN	14	11,38
5.	TENAGA KONTRAK	0	0,00
6.	LAIN - LAIN	103	83,73
JUMLAH		123	100,00

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan di atas, mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan **LAIN-LAIN** sebanyak **103 orang (83,73%)**.

BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGUNA LAYANAN PENGADILAN

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II pada Survei periode April - Juni 2025 berada pada 3,47- 4,00 rerata **4,00** atau dengan skala 100 adalah sebesar **100,00 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100).

Adapun capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I pada Survei periode Januari - Maret 2025 Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A berada pada rerata 3,47- 4,00 sebesar **3,86** atau dengan skala 100 adalah sebesar **96,61 %**.

Hal ini mengindikasikan telah terjadi kenaikan mutu pelayanan secara signifikan sesuai dengan rencana pada sasaran mutu dan kebijakan mutu yang telah ditetapkan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, dan analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

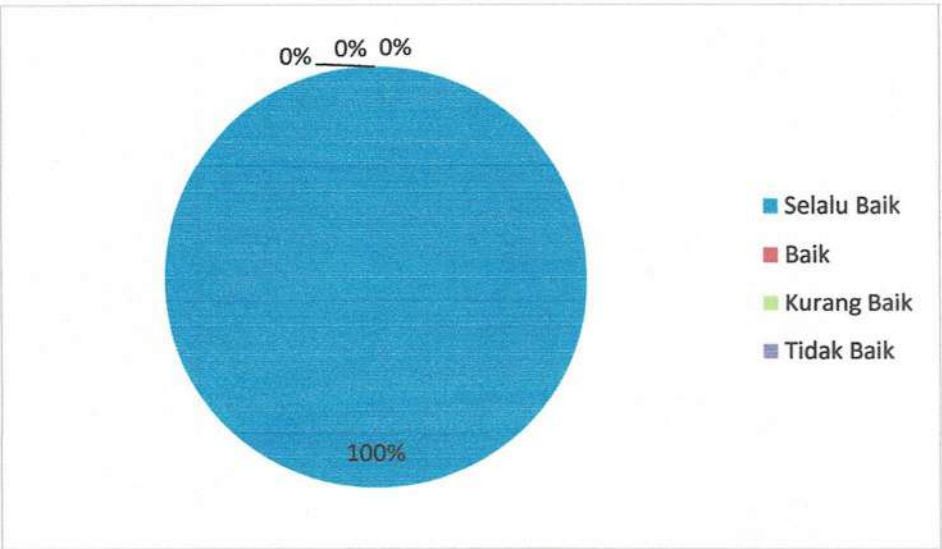
4.1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori “SANGAT BAIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Persyaratan

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Persyaratan

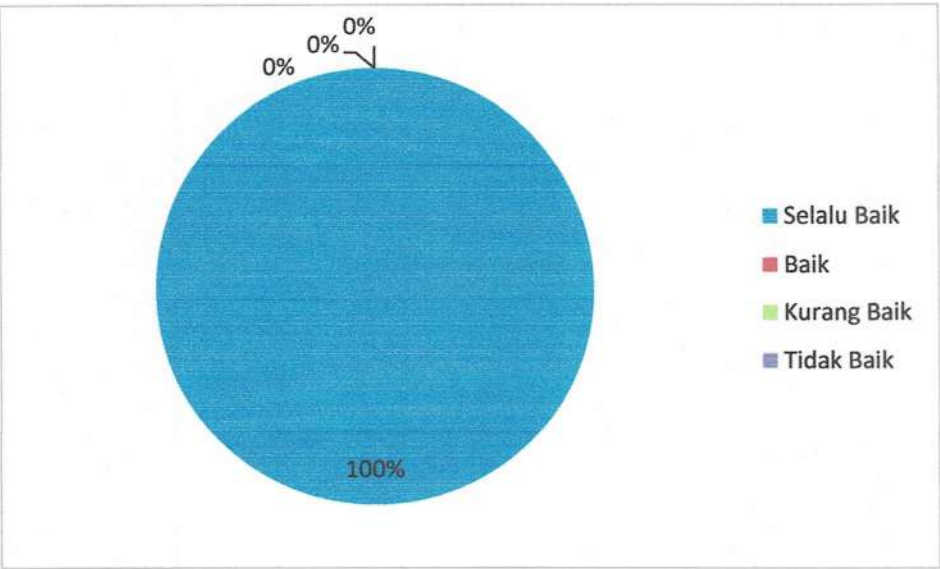
4.2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 4,00 berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Prosedur

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 2
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Prosedur

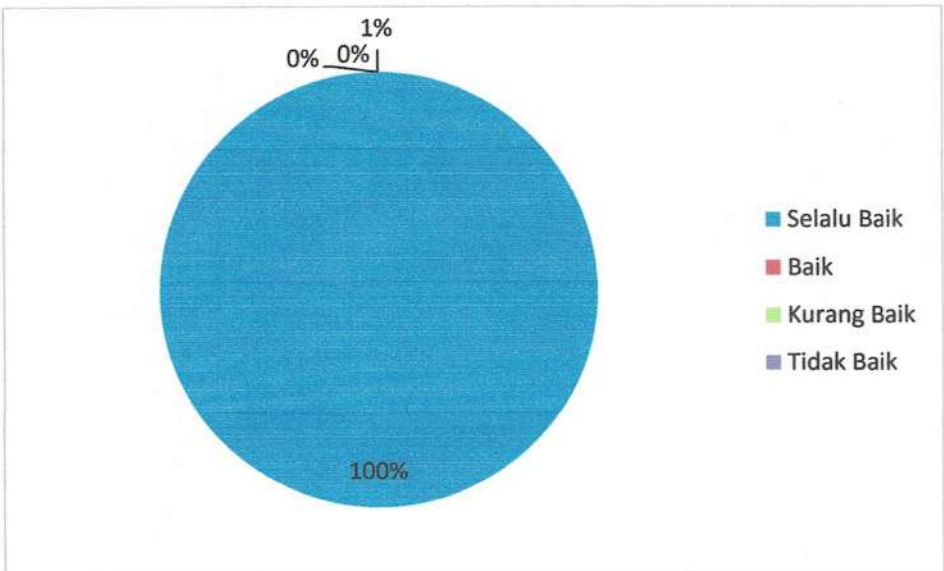
4.3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,00** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna Negeri / Hubungan Industrial Kelas I A Gresik
Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Waktu Pelayanan

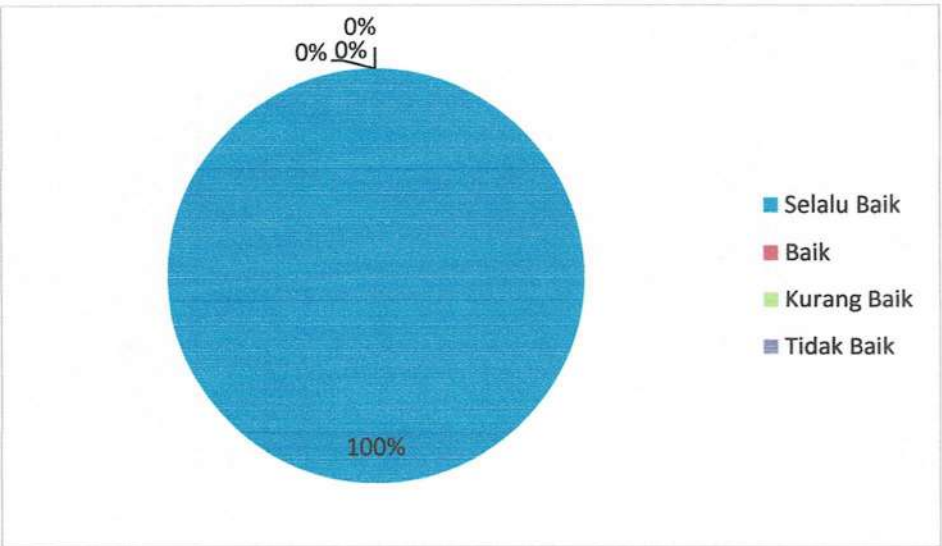
4.4. Biaya / Tarif

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Darihasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,00** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori “**SANGAT BAIK**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup biaya / tarif berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup biaya / tarif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Biaya / Tarif

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Biaya / Tarif

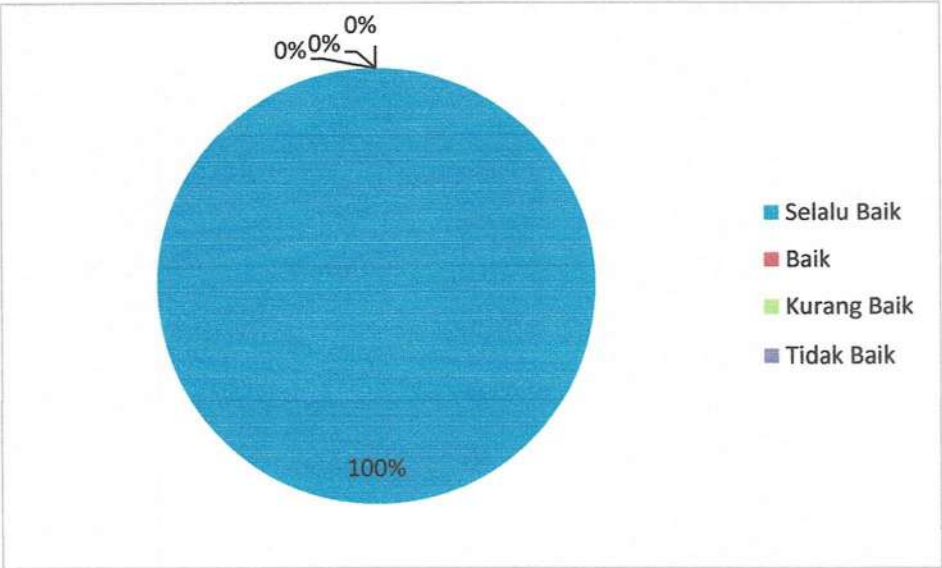
4.5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,00** berada pada interval skor 3,26 - 4 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

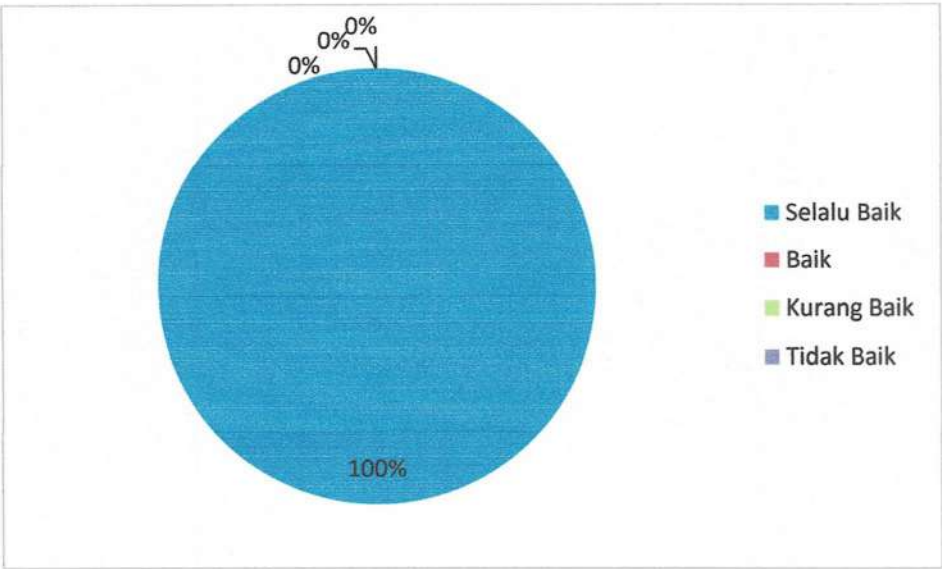
4.6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,84** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Kompetensi Pelaksana

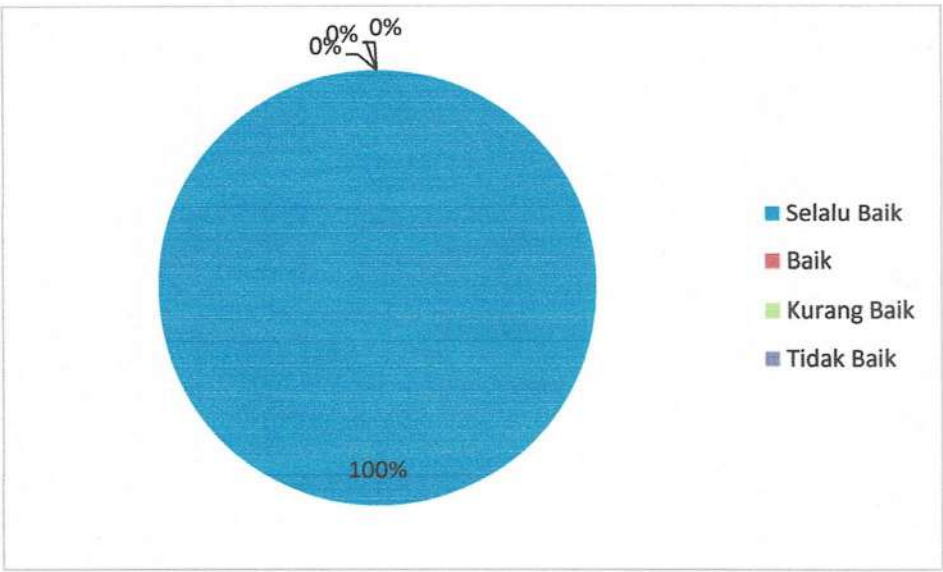
4.7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,86** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Perilaku Pelaksana

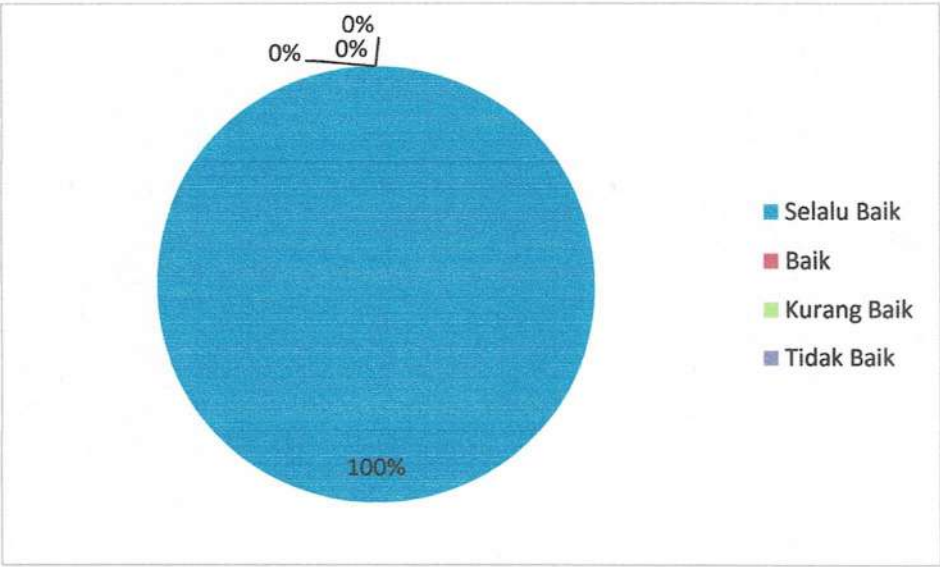
4.8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **3,88** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Maklumat Pelayanan

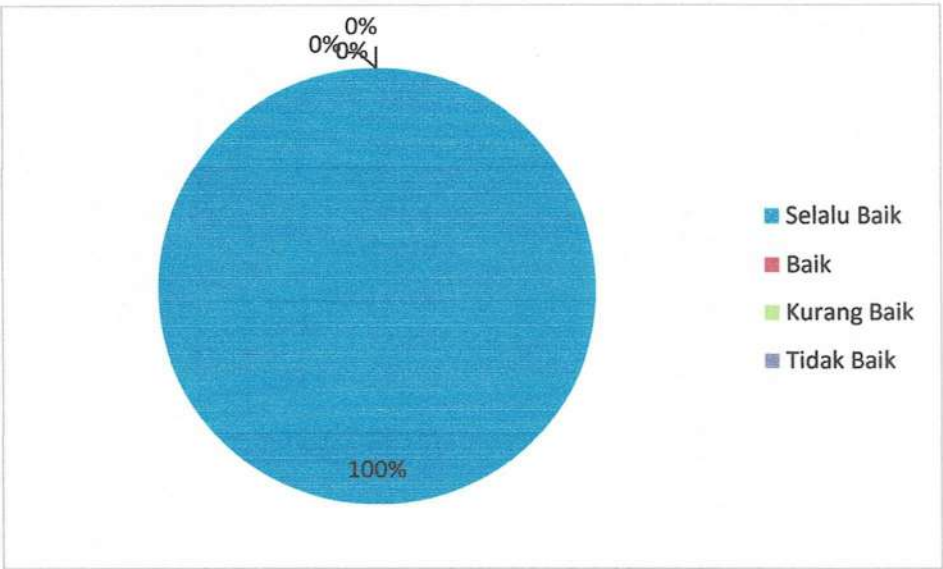
4.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar **4,00** berada pada interval skor 3,26 - 4,00 kategori **“SANGAT BAIK”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori **Sangat Baik**. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

NO.	JAWABAN	SKOR	FREKUENSI	
			f	%
1.	Sangat Baik	4	123	100,00
2.	Baik	3	0	0,00
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	0	0,00
JUMLAH			123	100,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini :



Gambar 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A
Ruang Lingkup : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



JUMLAH	123 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 83 ORANG	
	PEREMPUAN : 40 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 6 ORG	Diploma 3 : 0 ORG
	SMP : 9 ORG	S1 : 52 ORG
	SMU : 34 ORG	S2 : 22 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PNS : 1 ORG	SWASTA : 5 ORG
PEKERJAAN	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 14 ORG
	POLRI : 0 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
	LAINNYA : 103 ORG	

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A berada pada rerata sebesar **4,00** atau dengan skala 100 adalah sebesar **100,00 %** berada pada kategori **“SANGAT BAIK”** (pada interval 81,26 - 100).

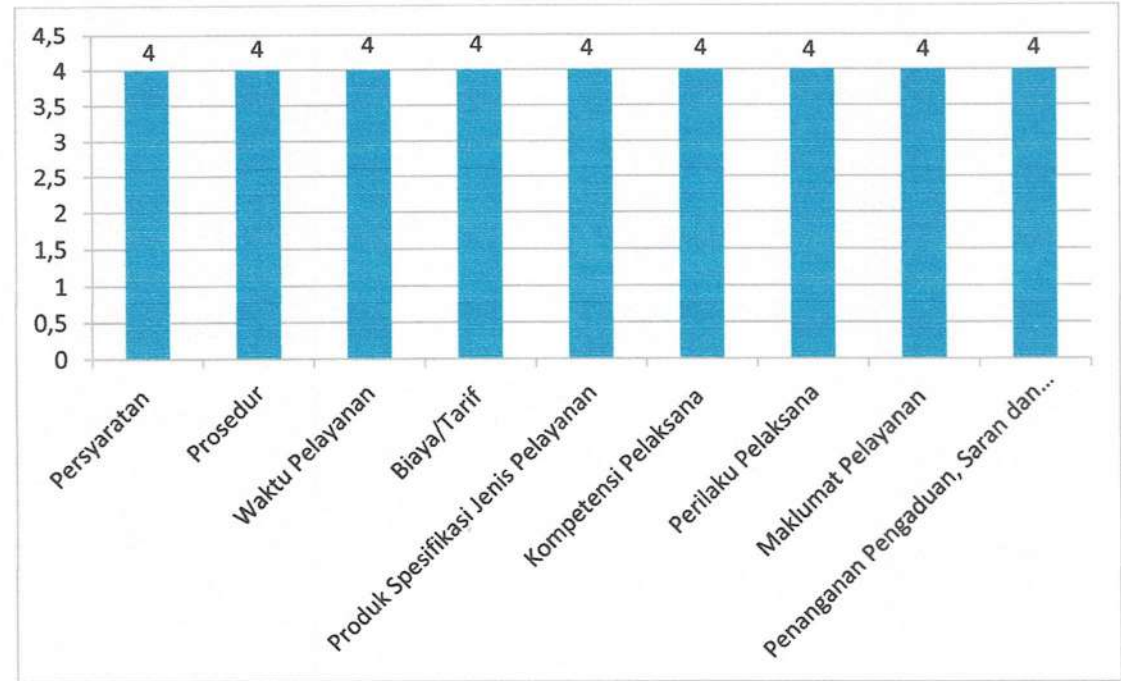
Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Waktu pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
4. Biaya / Tarif pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
8. Maklumat Pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A pada kategori SANGAT BAIK.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup sebagai berikut :

No.	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Ranking
1.	Persyaratan	4,00	1
2.	Prosedur	4,00	1
3.	Waktu Pelayanan	4,00	1
4.	Biaya / Tarif	4,00	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,00	1
6.	Kompetensi Pelaksana	4,00	1
7.	Perilaku Pelaksana	4,00	1
8.	Maklumat Pelayanan	4,00	1
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	4,00	1

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



5.2. Rekomendasi

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup yang nilainya masih masuk kategori 3 kebawah yaitu : **Persyaratan, Prosedur dan Waktu Pelayanan.**

RUJUKAN :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2004 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Surat Keterangan Nomor : 97 Tahun 2004 tentang KMA RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
7. Surat Keterangan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
9. Peraturan Menpan-RB Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
10. Peraturan Menpan RB Nomor : 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menpan-RB Nomor : 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
12. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
13. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1230/DJU/SK/HM.02.3/3/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan

Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum

14. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya
15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang pembaruan pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
16. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A Nomor : 91/KPN.W14-U31/OT.01.1/VI/2025 Tentang Penunjukan Tim Survei Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A